



BKKBN: Perlu Koordinasi Lintas Sektor Untuk Turunkan Angka Stunting 1,3 Persen di DIY Pada 2023



TRIBUN JOGJA/CHRISTI MAHATMA WARDHANI
FOTO BERSAMA - Wakil Gubernur, KGPAA Paku Alam X, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Andi Ritamariani, Sekretaris Utama BKKBN, Tavi Agus Rayanto bersama seluruh stakeholder seausai penandatanganan komitmen penurunan stunting DIY dalam Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rempug Stunting Tingkat DIY 2023 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, Kamis (7/9).

YOGYA, TRIBUN - Angka stunting di DIY terus menurun. Angka prevalensi stuntingg DIY pada 2021 lalu, mencapai 17,3 persen, kini pada 2022, turun 0,9 persen menjadi 16,4 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Andi Ritamariani mengatakan, perlu upaya strategis dan komitmen

bersama untuk menurunkan angka stunting DIY. Terlebih pada 2023 ini, ditargetkan angka prevalensi stunting DIY turun 1,3 persen menjadi 15,1 persen.

Ia merinci, angka stunting di Kulon Progo pada 2022 mencapai 15,8 persen, Bantul sebesar 14,9 persen, Gunungkidul mencapai 23,5 persen, Sleman sebesar 15 persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 13,8 persen.

"Kita patut bersyukur, karena di Kota Yogyakarta berhasil di bawah target nasional," katanya saat Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rempug Stunting Tingkat DIY 2023 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, Kamis (7/9).

Untuk menekan stunting, sejak 2022 lalu, pihaknya telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua wilayah, Satgas Penurunan Stunting, hingga membentuk Tim Pendamping Keluarga.

Di DIY ada sekitar 5.556 Tim Pendamping Keluarga yang mendampingi keluarga risiko stunting, mulai calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta).

"Sementara untuk Tim Percepatan Stunting ini terdiri bidan, kader penggerak PKK, kader KB atau BKKBN. Kemudian, kami juga melakukan pendataan keluarga (PK) 2023, dilanjutkan verifikasi dan validasi data. Yang akan melahirkan data *by name by address*, sehingga menjadi acuan untuk pemberian intervensi, baik itu sensitif maupun spesifik," paparnya.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor, kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi dan sektor lain, sehingga dapat mencapai target stunting 14 persen pada 2024 mendatang.

"Kita sudah membuat kemajuan dalam upaya penurunan stunting. Ini capaian yang harus kita syukuri, sebagai hasil kerja kolaborasi. Kami sangat mengapresiasi BKKBN, QPD DIY dan kabupaten/kota, dan lainnya yang telah berinovasi dengan program penurunan stunting," terangnya.

"Satu yang penting, adalah kolaborasi lintas sektor. Saat ini, dapat kita rasakan kolaborasi lintas sektor masih dirasa kurang, *stakeholder* bergerak sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci utama penurunan angka stunting," tandasnya.

Sementara Sekretaris Utama BKKBN, Tavi Agus Rayanto mengungkapkan, DIY menjadi salah satu provinsi dengan penurunan stunting di bawah 1 persen. Menurut dia, DIY seharusnya menjadi penyangga untuk daerah lain yang prevalensinya lebih tinggi.

"Tim Percepatan Penanganan Stunting di DIY sudah terbentuk, ini harus jadi perhatian. Koordinasi memang menjadi salah hal penting, baik horizontal maupun vertikal," ungkapnya.

Tavi juga menyoroti pemanfaatan *Elsimil*, aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil yang belum optimal.

Bahkan, ada anggapan aplikasi inovasi BKKBN ini menghambat masyarakat yang akan menikah.

"Bukan berarti nggak boleh menikah, kami tak menghambat juga. Ini menjadi upaya untuk menekan angka stunting. Karena, untuk mencegah stunting itu kan hamil tak boleh terlalu muda, tak boleh terlalu tua, tak boleh terlalu sering, dan tak boleh terlalu dekat. Dan, paling penting adalah 1.000 hari pertama kehidupan," imbuhnya. (maw/ord)



TRIBUN JOGJA/CHRISTI MAHATMA WARDHANI
DISKUSI - Suasana Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rempug Stunting Tingkat DIY 2023 di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, Kamis (7/9).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005